

**UPAYA *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* (FAO) DALAM
MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN DI NUSA TENGGARA TIMUR**



AGUNG PRAWOTO

E061171503

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : UPAYA *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* (FAO)
DALAM MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN DI NUSA
TENGGARA TIMUR

N A M A : AGUNG PRAWOTO

N I M : E061171503

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 22 Agustus 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003

Pembimbing II,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : UPAYA *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* (FAO)
DALAM MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN DI NUSA
TENGGARA TIMUR

N A M A : AGUNG PRAWOTO

N I M : E061171503

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 21 Agustus 2023.



Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

[Handwritten signatures of the evaluation team members]

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Prawoto

NIM : E061171503

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

**Upaya *Food And Agriculture Organization (FAO)* Dalam Menciptakan
Ketahanan Pangan Di Nusa Tenggara Timur**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain dan skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Agustus 2023




Agung Prawoto

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, adanya kesalahan dalam tulisan dalam penelitian ini adalah hal yang pasti terjadi sehingga penulis ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunannya sehingga diharapkan hal tersebut dapat menjadi masukan bagi penulis kedepannya. Selain dari itu, penulis haturkan banyak terima kasih kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi, mengingatkan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Terima kasih kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, bapak **H.Hamzah** dan Ibu **Hj.Sudarti** yang tak henti-hentinya memberikan *support*, dukungan, saran serta doa dan ridhanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis selama ini dan dalam penyusunan skripsi ini, semoga bapak dan ibu selalu berada dalam Rahmat, Hidayah dan Lindungan-Nya.
2. Terima kasih kepada kakak tercinta **Luky Purnamasari** dan adik tercinta **Afsal Hilal Hamdi** yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi dan studi yang dilalui oleh penulis. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki dan keberkahan hidup, Aamiin.

3. Terima kasih kepada **Andi Indah Mustika Saputri** yang selalu hadir untuk menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu hadir untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih telah menemani sebagian dari perjalanan hidup saya, semoga kitab bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
4. Terima kasih kepada bapak dan ibu Pembimbing I dan II penulis yaitu **Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph.D** dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** yang telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** beserta jajarannya.
6. Terima Kasih kepada Ketua Departemen Ilmu HI FISIP UNHAS **H. Darwis, MA, Ph.D** dan seluruh dosen pengajar HI FISIP UNHAS; bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari M.Si**, Bapak **Drs Aspiannor Masrie, M.Si**, Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B, MA**, Bapak **Muhammad Nasir Ba'du S. Sos. M.Si, Ph. D**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si**, Bapak **Burhanuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP**, Ibu **Drs. Pusparida Syahdan, S.Sos. M.Si**, Ibu **Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph.D**, Kak **Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si**, kak **Bama Andika Putra, S.IP, MIR**, kak **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** dan kak **Abdul Razaq Cangara, S.IP., M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan teman-teman penulis. Semoga selalu diberi keteguhan, kesabaran serta selalu dalam Lindungan-Nya dan

semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat bagi kami kedepannya, Aamiin.

7. Terima kasih kepada **Kak Rahma, Ibu Tia, dan Pak Ridho** yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi penulis selama perkuliahan. Semoga selalu diberi kesabaran dan kemudahan di segala urusannya, Aamiin.
8. Terima kasih kepada teman-teman **LIBERTE** angkatan 2017 yang telah menjadi rekan, dan saudara selama masa perkuliahan.
9. Terakhir untuk diri saya sendiri, **Agung Prawoto** terima kasih telah bertahan selama ini dan terima kasih untuk segala usaha dan kerja kerasnya. Semoga saya tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

ABSTRAK

Agung Prawoto, (E061171503), “Upaya *Food and Agriculture Organization (FAO)* dalam Menciptakan Ketahanan Pangan di Nusa Tenggara Timur”, dibawah bimbingan **Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph.D** selaku pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP., MA** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur dan upaya FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah adanya kebijakan stabilisasi harga pangan negara; keberlanjutan industri kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya; serta banyaknya bencana alam yang melanda, yang termuat dalam dimensi ketersediaan pangan dan pemanfaatan; serta penguasaan ukuran dan perubahan penggunaan lahan, perencanaan tata ruang dan yurisdiksi sektoral yang tumpang tindih; serta memiliki sistem yang rumit untuk berhubungan dengan mitra internasional, yang termuat dalam dimensi aksesibilitas dan stabilitas. Adapun upaya FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah dengan melakukan lima *project* yaitu ECTAD/EPT2 *Output B*; ECTAD/EPT2 *Output C*; OSRO/INS/301/USA(CA); TCP/INS/3502 (*Seaweed*) (DW4FS&SRD; dan GCP/RAS/289/GFF (ISLME); serta dengan melakukan kerjasama dengan mitra lainnya baik nasional (Instansi Indonesia yang relevan dalam implementasi program CPF di Indonesia) dan internasional; serta memelihara hubungan strategis dengan media-media besar di Indonesia

Kata Kunci: FAO, Ketahanan Pangan, Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

Agung Prawoto, (E061171503), "Food and Agriculture Organization (FAO) Efforts in Creating Food Security in East Nusa Tenggara", under the guidance of **Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph.D** as supervisor I and **Aswin Baharuddin, S.IP., MA** as supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. This study aims to determine the constraints of the FAO in realizing food security in East Nusa Tenggara and the efforts of the FAO in realizing food security in East Nusa Tenggara. The research method used in the preparation of this thesis is a qualitative research method with a descriptive approach, data collection techniques in the form of literature review sourced from various books, journals, documents, articles, newspapers, as well as from electronic media such as the internet and reports related to this research. The results of this study show that FAO's obstacles in realizing food security in East Nusa Tenggara (NTT) are the country's food price stabilization policy; sustainability of the palm oil industry and other plantation crops; and the number of natural disasters that hit, which are contained in the dimensions of food availability and utilization; and control of size and change in land use, spatial planning and overlapping sectoral jurisdictions; and has a complex system for dealing with international partners, which is contained in the dimensions of accessibility and stability. FAO's efforts in realizing food security in East Nusa Tenggara (NTT) are by conducting five projects, namely ECTAD / EPT2 Output B; ECTAD/EPT2 Output C; OSRO/INS/301/USA(CA); TCP/INS/3502 (Seaweed) (DW4FS&SRD; and GCP/RAS/289/GFF (ISLME); as well as by collaborating with other partners both nationally (Indonesian agencies relevant in the implementation of CPF programs in Indonesia) and internationally; and maintain strategic relationships with major media in Indonesia

Keywords: FAO, *Food Security*, East Nusa Tenggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
1. Konsep Organisasi Internasional.....	12
2. Konsep Ketahanan pangan.....	14
3. Konsep Krisis Pangan.....	17
E. Metode Penelitian.....	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3. Teknik Analisis Data.....	21
4. Metode Penulisan.....	22
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Konsep Organisasi Internasional.....	23
B. Konsep Ketahanan Pangan (Food Security).....	29
C. Konsep Krisis Pangan.....	32
BAB III	36
GAMBARAN UMUM	36
A. Perkembangan Country Programming Framework - Food and Agriculture Organization (CPF-FAO) di Indonesia	36
B. Perkembangan Krisis Pangan di Nusa Tenggara Timur Indonesia	48
BAB IV	75
HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Upaya FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT)....	75
B. Kendala FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT)..	81

BAB V	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B.Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 1 Kerangka Penelitian.....	11
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Penyebaran Proyek FAO secara geografis di Indonesia	46
Gambar 3 2 Peta Administrasi Provinsi NTT	49
Gambar 3 3 Peta Kerentanan Pangan Tingkat Desa di Provinsi NTT 2016	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Daftar Luas Kabupaten/Kota beserta Ibukota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	50
Tabel 3 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2020	52
Tabel 3 3 Produksi Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu & Ubi Jalar) Tahun 2019	59
Tabel 3 4 Provinsi dengan jumlah Persentase Rumah Tangga Tanpa Listrik Terparah di Indonesia 2015-2019.....	62
Tabel 3 5 Provinsi dengan jumlah Persentase Penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan Terparah di Indonesia 2015-2019	63
Tabel 3 6 Total Provinsi dengan jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Terparah di Indonesia 2017-2019	64
Tabel 3 7 Provinsi dengan Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk di Indonesia 2017-2019.....	65
Tabel 3 8 Provinsi dengan Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih di Indonesia 2017-2019.....	67
Tabel 3 9 Provinsi dengan Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan.....	68
Tabel 3 10 Provinsi dengan Prevalensi Kurang Gizi pada Balita per Provinsi (Stunting, Underweight dan Wasting) terburuk Tahun 2019.....	69
Tabel 3 11 Klasifikasi WHO untuk Stunting, Underweight dan Wasting dalam populasi	70
Tabel 3 12 Data Indikator Prioritas Ketahanan Pangan Kabupaten & Kota NTT	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa kini, masalah-masalah yang terjadi dalam dunia internasional bukan lagi permasalahan mengenai militer saja. Era globalisasi yang semakin berkembang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan salah satunya adalah masalah ketahanan pangan. Dalam dunia internasional, ketahanan pangan didefinisikan sebagai keadaan ketika semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat (Kompas, 2020). Oleh karena itu, permasalahan mengenai pangan perlu ditangani secara serius sebab perkembangan masalah kontemporer yang terjadi tidak hanya melibatkan aspek militer semata melainkan juga melibatkan aspek non-militer.

Ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (tirto, 2021). Dengan melihat pengertian

tersebut, ketahanan pangan menjadi masalah baru dalam dunia internasional dan mendapat perhatian jika tidak terpenuhi dalam suatu negara, sebab pangan dapat digambarkan sebagai kebutuhan untuk terus tumbuh dan berkembang demi kelangsungan hidup. Pangan pada manusia dapat digambarkan sebagai kebutuhan untuk terus tumbuh dan berkembang demi kelangsungan hidup.

Sebagaimana dari pemahaman sebelumnya maka pangan merupakan masalah besar bagi suatu negara apabila dihadapkan pada krisis pangan, dimana ketika produktivitas pangan menurun tentunya berimbas pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada masyarakat. Hal ini kemudian secara perlahan akan melahirkan ancaman terhadap *global security* (Mudrieq, 2014). Melihat realitas saat ini mengenai permintaan pangan yang hanya dipenuhi secara agregat, masih dijumpai kesenjangan yang sangat besar terkait dengan akses pangan yang dipengaruhi oleh lintas wilayah geografis dan lintas spektrum pendapatan di tingkat rumah tangga dan tingkat negara. Sementara itu terjadinya krisis finansial global dan perubahan iklim mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat menurun sehingga akses penduduk terhadap pangan menurun, mengakibatkan ketahanan pangan menjadi lebih rawan (Heru, 2021). Dampak yang ditimbulkan tersebut pun dapat diperparah apabila tidak adanya upaya signifikan dalam mengurangi dampak terhadap krisis pangan tersebut, terlebih perlunya pula melihat dampak yang dapat dihasilkan dari perubahan iklim serta krisis finansial tersebut.

FAO memperkirakan kebutuhan pangan untuk negara-negara berkembang akan meningkat sebesar 60% pada tahun 2030 dan berlipat dua kali pada tahun 2050, atau ekuivalen dengan kebutuhan peningkatan produksi dunia sebesar 42% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050. Peningkatan *demand* pangan sebagai konsekuensi dari peningkatan populasi dunia yang menurut skenario bahwa penduduk dunia akan bertambah sebanyak 73 juta orang setiap tahun antara tahun 1995-2020, ini berarti terjadi peningkatan sebesar 32% dalam kurun waktu tersebut, sehingga diperkirakan penduduk dunia akan mencapai 7,5 milyar orang pada tahun 2020 (Behnassi dan Sanni, 2011). Bahkan, kegiatan yang terlibat dalam sistem pangan telah menyumbang sekitar 20%–30% dari semua emisi gas rumah kaca (GRK) terkait manusia, dan, dengan demikian, berkontribusi terhadap perubahan iklim (Berry, 2019). Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa peningkatan jumlah populasi yang signifikan tentu akan berhubungan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat atas pangan sehingga beragam aspek yang dapat mempengaruhi produktivitas tersebut perlu untuk dievaluasi secara berkala, agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Peningkatan kebutuhan pangan yang cukup tajam akan menyebabkan kenaikan harga semua jenis bahan pangan, sehingga jumlah penduduk miskin dan kelaparan meningkat. Saat ini, jumlah penduduk dunia yang miskin dan kelaparan setiap hari sudah melebihi 1 miliar orang (lebih dari 15% dari populasi), karena tidak dapat akses pangan yang diperlukan untuk hidup sehat

dan produktif. Mereka tidak memperoleh haknya akan pangan yang cukup. Krisis pangan juga diperparah oleh kondisi jangka pendek yang terjadi akibat kenaikan harga komoditi pangan yang cukup signifikan. (Ala, 2017). Hal ini tentu saja berdampak krusial bagi kelangsungan hidup manusia sehingga upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah bagaimana agar dampak yang dihasilkan dari fenomena tersebut dapat diminimalisir.

US Department of Agriculture (USDA) & International Grains Council (IGC) memproyeksikan bahwa produksi padi global pada 2019/2020 menurun 0,4% sampai 0,5%, dibandingkan dengan produksi pada 2018/2019. Realisasi padi secara global yang tercatat oleh IGC pada 2019-2020 diproyeksikan sebesar 498 juta ton atau lebih rendah dari realisasi 2018-2019 yang mencapai 500,1 juta ton. Sementara USDA memproyeksikan produksi padi secara global pada sepanjang 2019-2020 mencapai 493,8 juta ton atau lebih rendah dari realisasi produksi padi secara global pada 2018- 2019 yang mencapai 496,5 juta ton. Indeks harga pangan dunia periode Januari-Mei 2020 cenderung menurun. Penurunan relatif tajam terjadi pada harga minyak nabati dan hasil peternakan (CNBC Indonesia, 2020). Angka tersebut dapat diartikan sebagai penurunan produksi pangan yang ada secara global dan tentu saja hal tersebut berpotensi besar dapat mengganggu atau memperparah krisis pangan yang terjadi secara global.

Krisis pangan di dunia berdampak pula pada ketahanan pangan di Indonesia. Sejumlah masalah besar dihadapi Pemerintah Indonesia dalam

mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain soal pembiayaan pertanian, Indonesia ditengarai akan menghadapi krisis petani pada 10 hingga 20 tahun ke depan. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah petani pada 2025 nanti hanya berkisar sekitar 6 juta orang. Proses regenerasi petani kita tiap tahun turun. Ini akan menyebabkan penurunan ketahanan pangan (LIPI, 2017). Dimana salah satu daerah yang berdampak terhadap krisis pangan adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT pada tahun 2020 mengalami krisis sektor produksi konsumsi rumah tangga saat ini yang disebut *Umbu Wulang*. Data menunjukkan bahwa NTT adalah salah satu provinsi dengan impor sektor konsumsi tertinggi di Indonesia dimana pangan, sandang dan papan mayoritas impor (Mongabay, 2020). Hal ini tentu saja dapat menjadi perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah sebab aspek primer seperti pangan, sandang dan papan mayoritas masih perlu diimpor padahal hal tersebut adalah tanggungjawab dari pemerintah itu sendiri.

Pada tahun 2018, ketersediaan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum mengalami penurunan. Dimana produksi umbi-umbian serta sereal sebagai salah satu makanan pokok (pangan lokal) menurun sebesar 2,57 persen per tahun untuk ubi jalar dan ubi kayu sebesar 2,57 persen per tahunnya. Berdasarkan rasio konsumsi per kapita (NCPR), terdapat 50 dari 300 kecamatan (16,7 persen) di NTT dalam kondisi defisit dalam penyediaan sereal dan umbi-umbian. Kecamatan-kecamatan yang mengalami defisit tersebut pada umumnya merupakan kecamatan pusat kabupaten yang

mempunyai karakteristik luas lahan tanam yang rendah serta jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh produksi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu saja (Berek, 2018). Penurunan produksi yang berdampak pada penyediaan sumber pangan tentu menjadi perhatian bersama, adanya produksi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu juga mengindikasikan bahwa kurangnya penyebaran yang merata dalam penyediaan sumber pangan yang merata secara inklusif bagi masyarakat di NTT.

Dalam menanggapi permasalahan krisis dunia, kemudian hadir badan-badan dan organisasi internasional yang bernama FAO. Badan ini merupakan salah satu anak organisasi internasional dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 16 Oktober 1945. FAO merupakan organisasi PBB yang pertama mengadopsi suatu pernyataan misi yang diutamakan untuk mengurangi kelaparan global dan kemiskinan. Sebagai lembaga garis depan PBB dalam memerangi kelaparan, FAO terus menanggapi keadaan darurat di berbagai belahan dunia. FAO sebagai salah satu organisasi humanitarian menyelamatkan nyawa dengan mendapatkan makanan untuk kasus kelaparan dunia. Tapi FAO juga bekerja untuk membantu mencegah kelaparan di masa depan. FAO melakukan hal ini melalui program yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk membangun aset, menyebarkan pengetahuan dan memelihara gizi, sehingga masyarakat lebih dinamis. Hal ini membantu masyarakat menjadi lebih merasakan ketahanan pangan daerahnya (Octaviana,

2017). Selain itu, hal ini juga dapat dipastikan sebagai upaya serius bagi masyarakat dunia terhadap krisis pangan yang terjadi secara global.

Salah satu program FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah CPF. CPF menetapkan empat bidang prioritas pemerintah untuk memandu kemitraan dan dukungan FAO dengan Pemerintah Indonesia. Kerangka Kerja Pemrograman Negara (CPF) FAO dan Pemerintah Indonesia adalah dokumen hidup yang menetapkan empat bidang prioritas pemerintah, di mana FAO akan bekerja dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia jangka waktu lima tahun, dari 2016 hingga 2020. Proses persiapannya dipimpin oleh Perencanaan Pembangunan Nasional Badan (BAPPENAS), dalam konsultasi dan kesepakatan dengan kementerian teknis khususnya Kementerian Pertanian sebagai *Focal Point* FAO. Dalam konteks di atas, FAO melalui konsultasi dengan Kementerian terkait dan BAPPENAS, telah mengelaborasi empat strategi. Bidang yang diambil dari prioritas Pemerintah Indonesia, di mana CPF (2016-2020) akan berkontribusi (FAO, 2017). Adanya program ini tentu bukan hanya menjadi upaya serius bagi FAO semata melainkan juga bagi Indonesia dimana di beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami permasalahan mengenai ketersediaan pangan. Program ini tentu perlu untuk ditanggapi secara serius oleh pemerintah dalam mengembangkan produktivitas pangan yang terjadi di wilayahnya yang luas.

CPF menetapkan empat bidang prioritas pemerintah untuk memandu kemitraan dan dukungan FAO dengan Pemerintah Indonesia (RI). Dokumen ini

sejalan dengan lima prioritas regional yang disahkan oleh Konferensi Regional Asia Pasifik ke-31 dan ke-32: (i) memperkuat ketahanan pangan dan gizi; (ii) mendorong produksi pertanian dan pembangunan pedesaan; (iii) meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan, produktif dan berkelanjutan; (iv) meningkatkan kapasitas untuk menanggapi ancaman dan keadaan darurat pangan dan pertanian; dan (v) mewujudkan dampak perubahan iklim terhadap pangan dan pertanian. (FAO, 2017). Kelima prioritas tersebut pun kemudian perlu direduksi ke dalam program nasional yang tentu saja akan melalui konsultasi dan kerjasama dari negara maupun masyarakat setempat.

Kasus krisis pangan menjadi kasus yang krusial bagi setiap negara karena pangan berhubungan dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Krisis pangan tidak hanya terjadi didalam negara Indonesia saja tetapi krisis pangan telah mendunia dan menjadi permasalahan global. Sehingga, Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan keterlibatan dan bantuan pihak luar salah satunya adanya organisasi FAO untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan mengenai krisis pangan di Indonesia terkhusus provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh penulis sehingga diharapkan hal tersebut akan menambah wawasan terkait upaya FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Upaya FAO dalam Menciptakan Ketahanan Pangan di Nusa Tenggara Timur dalam rentang tahun 2016-2020. Dengan batasan tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kendala FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT)?
2. Bagaimana upaya FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kendala FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan referensi terkait upaya FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa

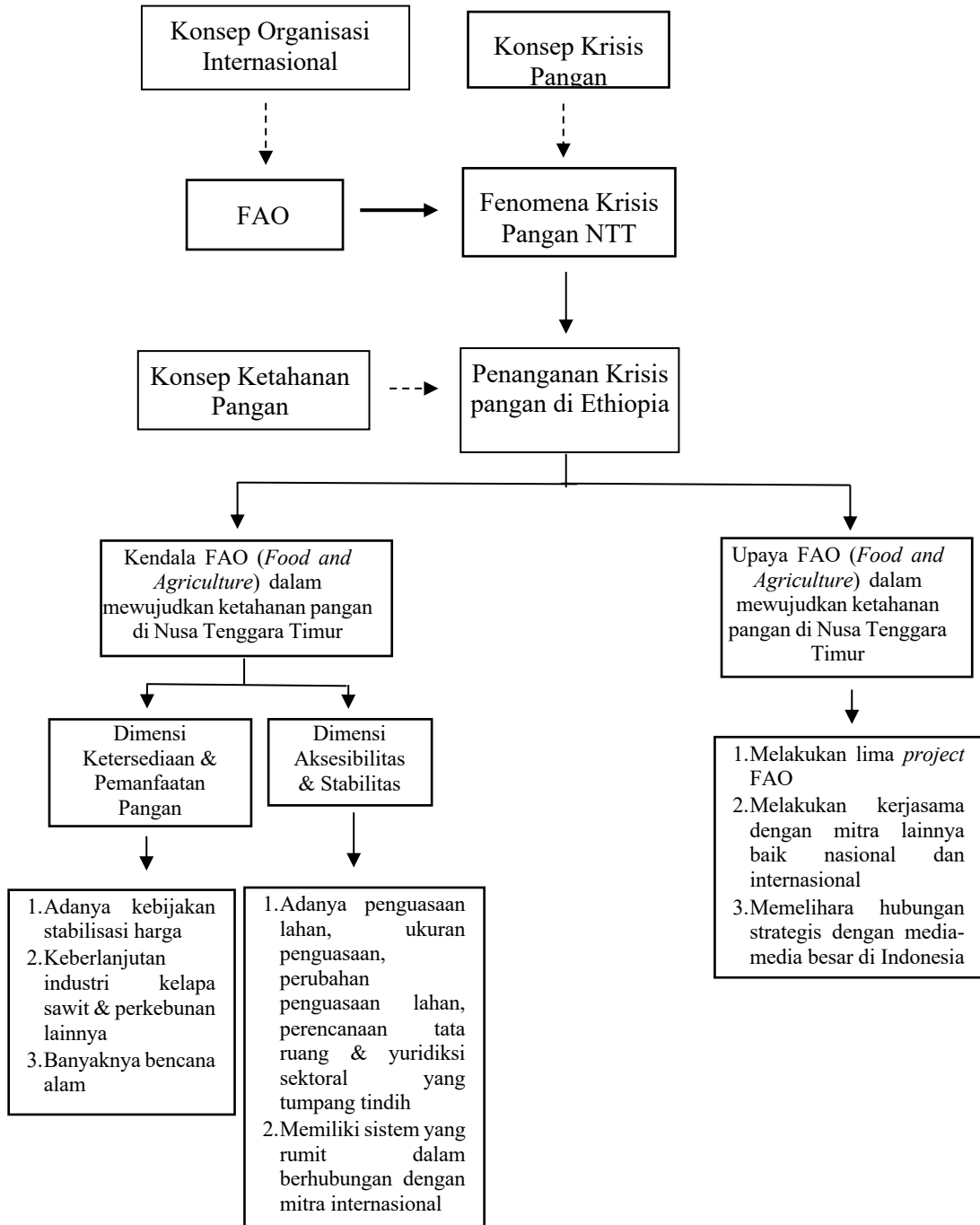
Tenggara Timur secara umum.

- b. Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pengambil kebijakan, khususnya mewujudkan krisis pangan di dunia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga konsep yaitu konsep sebagai landasan dalam penelitian. Konsep Organisasi Internasional akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme FAO sebagai suatu organisasi internasional dalam mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Konsep Krisis pangan akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana permasalahan krisis pangan yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan konsep ketahanan pangan digunakan untuk menganalisis bagaimana model ketahanan pangan yang perlu direalisasikan untuk menjaga daerah Nusa Tenggara Timur dari krisis pangan.

Bagan 1 1 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah oleh penulis

1. Konsep Organisasi Internasional

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Pada era ini, dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak- pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi internasional (Robert & Sorensen, 2009). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional dalam kajian hubungan internasional lebih banyak merujuk pada organisasi yang terbentuk dari perjanjian antar negara (*intergovernmental organization*) (Candrawati, 2021).

Organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dari adanya kesepakatan

antar anggotanya baik itu sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya (Archer, 2001). Hal ini kemudian dikembangkan dengan pendapat Umar S. Bakry yang mengklasifikasi organisasi internasional berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu *Intergovernmental Organization* (IGO) dan *Non-Government Organization* (NGO) (Sarma, 2022).

Intergovernmental organizations (IGOs) adalah organisasi internasional yang beranggotakan paling sedikit tiga negara yang diikat dengan sebuah perjanjian resmi antar pemerintah negara anggotanya, dan memiliki aktivitas di beberapa negara. Namun, kekuatan yang dimiliki oleh sebuah IGOs hanya terbatas pada kemampuannya untuk mendesak keputusan yang telah dibuat. Sebagian besar IGOs hanya dapat memberikan rekomendasi akan sebuah keputusan. IGOs menggunakan pendekatan moral untuk membuat aktor tertentu menyetujui keputusan yang telah diambil. Keberhasilan IGOs bergantung kepada aktor yang mau menyetujui keputusan yang direkomendasikan (Adilfi, 2022).

Berdasarkan teori peranan organisasi internasional, terdapat tiga kategori peranan sebuah organisasi internasional diantaranya

organisasi internasional yang hadir sebagai instrumen yang digunakan negara anggotanya, sebagai arena pertemuan negara anggotanya maupun sebagai aktor independen yang dapat membuat keputusannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut FAO yang hadir di Indonesia memiliki peranan sebagai sebuah aktor yang independen dan sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan beberapa kebutuhannya dalam kaitan dengan ketahanan pangan Indonesia (Bere, 2019)

2. Konsep Ketahanan pangan

Dari perspektif sejarah, istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai mengemuka saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 1971. Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada *International Conference of Nutrition* pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif (Hakim, 2014). Kemudian pada *World Summit on Food Security 2009*, revisi resmi terakhir yang menambahkan dimensi keempat stabilitas pada konsep ketahanan pangan, terdiri dari ketersediaan; aksesibilitas; pemanfaatan dan stabilitas, berkaitan

dengan kemampuan bangsa/komunitas/(rumah tangga) dalam menahan guncangan sistem rantai pangan baik yang disebabkan oleh bencana alam (iklim, gempa bumi) maupun karena ulah manusia (perang, krisis ekonomi) (Berry, 2019).

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah menempatkan program ketahanan pangan suatu kebutuhan yang sangat penting dan bersifat urusan wajib. Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi (Sutrisno, 2022)

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan FSVA 2020 dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020)..

- a. Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
- b. Pilar akses atau keterjangkauan pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan.
- c. Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap

dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai krisis pangan bahwa setiap negara perlu memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya sendiri, maka dari itu pemerintah sebagai tombak dalam sebuah negara bertanggung jawab dalam menangani permasalahan tersebut termasuk FAO sebagai lembaga yang berperan di dalamnya ikut serta turun menangani masalah tersebut.

3. Konsep Krisis Pangan

Krisis pangan merupakan salah satu isu internasional yang masih melanda banyak negara di dunia. Krisis pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang terjadi ketika seseorang tidak mempunyai akses, jumlah, serta gizi yang aman terhadap bahan pangan olahan maupun bukan olahan untuk perkembangan dan pertumbuhan yang normal agar dapat memiliki kehidupan yang sehat dan aktif

(Nasyrah, 2019). Hal ini tentu saja merupakan permasalahan penting untuk diperhatikan sehingga persoalan seperti hal tersebut perlu untuk dibahas dan diterapkan kedalam hukum nasional.

Pengertian tentang krisis pangan tercantum juga dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang menyebutkan bahwa Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang (Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2022). Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi yang disebutkan sebelumnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa krisis pangan dapat terjadi sehingga upaya-upaya yang dapat dilakukan selanjutnya dapat mewujudkan krisis pangan tersebut.

FAO mendefinisikan krisis pangan sebagai suatu kondisi ketika terjadinya kerawanan pangan dan malnutrisi yang sangat meningkat baik di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi ini membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui bantuan darurat (FAO, 2022). Kondisi ini juga disebabkan oleh perubahan iklim, konflik sosial, bencana alam dan lingkungan, serta kesulitan distribusi pangan (News, 2017). Tentu saja hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya strategis lainnya sebagaimana yang

dilakukan oleh FAO.

Dalam laporan FAO “*Global Report on Food Crises*” di jelaskan bahwa penyebab terjadinya krisis pangan akut adalah ketika tingkat keparahan yang dapat mengancam kehidupan atau mata pencaharian terlepas dari penyebab, durasi maupun konteksnya. Dalam laporan tersebut, FAO menjabarkan kategori dimana kondisi dapat dikatakan sebagai krisis pangan. Fase tersebut dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut (Food Security Information Network, 2022).

1. Tidak ada atau krisis pangan minim
 - a) Setiap rumah tangga bisa atau memenuhi kebutuhan pangan maupun nonpangannya tanpa harus melakukan tindakan tak lazim untuk mendapatkan penghasilan dan pangan
 - b) Diperlukannya aksi menekan risiko bencana dan membangun ketahanan pangan.
2. Tertekan atau *stressed*
 - a) Setiap rumah tangga mempunyai akses untuk pangan tapi tak mampu membayar kebutuhan nonpangannya tanpa melakukan tindakan yang dapat memicu stress
 - b) Dibutuhkannya aksi untuk melindungi sumber pencaharian dan menekan risiko bencana
3. Krisis

- a) Adanya gap dalam konsumsi rumah tangga yang dapat tercermin dari angka gizi buruk yang lebih tinggi dari biasanya
- b) Mampu memenuhi kebutuhan pangan minimumnya tapi hanya dengan cara menghabiskan aset pentingnya
- c) Membutuhkan tindakan sesegera mungkin agar dapat melindungi mata pencaharian dan mengurangi tingkat kesenjangan konsumsi pangan

4. Darurat

- a) Adanya gap konsumsi pangan yang berjumlah besar, digambarkan dengan jumlah malnutrisi yang sangat tinggi serta angka kematian yang sangat melampaui batas
- b) Mampu mengurangi jumlah kesenjangan konsumsi pangan tetapi dengan cara menghabiskan pendapatan yang darurat atau menjual semua aset yang ada
- c) Diperlukannya tindakan untuk menyelamatkan nyawa serta mata pencaharian

5. Bencana atau kelaparan

- a) Sangat kekurangan makanan atau kebutuhan dasar lainnya
- b) Terjadinya kemelaratan, kelaparan, kematian, serta tingkat malnutrisi akut yang sangat tinggi

- c) Diperlukan tindakan untuk mencegah kematian yang meluas serta kehancuran pada mata pencaharian

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Tipe ini berupaya menggambarkan bagaimana situasi dan perkembangan pangan di Nusa Tenggara Timur dan bagaimana FAO mewujudkan permasalahan tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti literatur dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yakni analisis data kualitatif. Penulis akan melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan mengenai upaya FAO dalam mewujudkan krisis pangan di Nusa Tenggara Timur. Fakta yang ada kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen

yang tepat, sedangkan data kuantitatif berfungsi sebagai pendukung dalam penguatan analisis kualitatif.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang meringkas masalah-masalah dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Organisasi Internasional

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Alhasil, Organisasi internasional dapat dipandang sebagai aktor internasional sebab dapat memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Berek, 2018).

Selain itu, dampak organisasi internasional dapat diidentifikasi dari berbagai bidang. Fungsi politik dari organisasi internasional adalah untuk menyediakan sarana kerja sama di antara negara-negara di berbagai bidang yang tentu saja memberikan keuntungan bagi semua atau sejumlah besar negara. Fungsi sosial adalah untuk mencoba mengurangi kesenjangan sosial. Fungsi ekonomi adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam skala global, dan fungsi lingkungan adalah untuk melakukan upaya kolaboratif untuk

mewujudkan masalah lingkungan global (Bhandari, 2019). Namun, terdapat pula fungsi lainnya dari organisasi internasional sebagaimana menurut Archer yaitu *Articulation and aggregation, Norms, Recruitment, Socialization, Rule Making dan Rule Application* (Octaviana, 2017).

Menurutnya, *Articulation and aggregation* adalah fungsi untuk menampung, memproses, serta menyalurkan ide-ide, tuntutan dan kepentingan Negara-negara yang masuk kedalam keanggotaannya; *Norms* adalah memiliki pengaruh didalam pembentukan norma-norma serta isu-isu mana yang perlu difokuskan dalam dunia internasional; *Recruitment* adalah merekrut Negara-negara anggota yang belum masuk kedalam keanggotaan; *Socialization* adalah sebuah proses menanamkan suatu ide yang ada di suatu lembaga kepada Negara-negara sehingga Negara tersebut dapat diterima oleh nilai-nilai yang ada di lembaga tersebut; *Rule Making* adalah dapat membuat kebijakan serta peraturan yang mengikat kepada Negara-negara yang menjadi anggotanya; *Rule Application* adalah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan yang ada (Octaviana, 2017).

Secara historis, organisasi internasional telah ada sejak dahulu kala dimana organisasi internasional pertama kali dibuat oleh perjanjian antar negara-negara yang dirancang khusus untuk menangani masalah yang dihadapi sejumlah negara pada abad kesembilan belas. Pada awalnya organisasi tersebut dirancang untuk mewujudkan masalah yang sangat spesifik yang bersifat ekonomi dan teknis. Namun, organisasi tersebut secara perlahan meningkat

kuantitasnya pasca Perang Dunia I (1914-1918) (Barkin, 2006)¹ hingga organisasi internasional dapat dilihat sebagai agen kekuatan untuk globalisasi yang disebabkan oleh perubahan teknologi yang menyebabkan banyaknya saling ketergantungan di antara negara-negara (Bhandari, 2019)².

Menurut Kahn dalam Bhandari, secara teoritis penelitian mengenai organisasi difokuskan pada dua aspek yaitu Pertama, unit produksi dan faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas atau produktivitas organisasi dan Kedua, set individu yang kesejahteraannya dipengaruhi oleh persyaratan keanggotaan organisasi dan yang motivasinya untuk melanjutkan keanggotaan itu tergantung pada penilaian mereka tentang kontribusi komparatifnya terhadap kesejahteraan mereka (Bhandari, 2019)³. Dengan memperhatikan kedua aspek tersebut maka perlunya keseriusan bagi pelaku atau yang terlibat dalam pengelolaan organisasi internasional atas masalah tersebut.

Menurut *Union of International Associations* (UIA) dalam Buku Tahunan Organisasi Internasional (1976/1977) menyatakan bahwa terdapat delapan kriteria utama dalam organisasi internasional yaitu (1) tujuan harus benar-benar internasional dengan maksud untuk mencakup setidaknya tiga negara. (2) Keanggotaan harus individu atau melibatkan partisipasi kolektif, dengan hak suara penuh, dari setidaknya tiga negara bagian dan harus terbuka

untuk setiap individu atau entitas yang memenuhi syarat secara tepat di bidang operasi organisasi. (3) Konstitusi harus menyediakan struktur formal yang memberi anggota hak untuk secara berkala memilih badan dan pejabat pemerintahan. (4) Petugas tidak boleh semuanya berkebangsaan sama selama lebih dari jangka waktu tertentu. (5) Harus ada kontribusi besar terhadap anggaran dari setidaknya tiga negara bagian dan tidak boleh ada upaya untuk menghasilkan keuntungan untuk didistribusikan kepada anggota. (6) Mereka yang memiliki hubungan organik dengan organisasi lain harus menunjukkan bahwa mereka dapat eksis secara independen dan memilih pejabat mereka sendiri. (7) Bukti kegiatan harus tersedia, dan (8) ada beberapa kriteria negatif: ukuran, politik, ideologi, bidang kegiatan, lokasi geografis kantor pusat, dan nomenklatur tidak relevan dalam memutuskan apakah suatu pengaturan adalah "organisasi internasional" atau tidak (Bhandari, 2019). Kedelapan aspek tersebut juga menjadi landasan dalam praktik operasional organisasi internasional sehingga diharapkan tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.

Adapun jenisnya, perbedaan yang paling relevan adalah antara organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah internasional (INGO). Karns et al memberikan definisi IGO sebagai organisasi yang anggotanya mencakup setidaknya tiga negara bagian, yang memiliki kegiatan di beberapa negara bagian, dan yang anggotanya disatukan oleh perjanjian antar pemerintah formal sedangkan organisasi non-pemerintah (NGO) adalah "organisasi sukarela swasta yang anggotanya adalah individu atau asosiasi yang

berkumpul untuk mencapai tujuan bersama" (Margaret P Karns, 2010). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum organisasi internasional (IO) adalah organisasi yang disusun oleh aturan untuk tujuan yang berkelanjutan. Tidak seperti koalisi atau aliansi informal, organisasi internasional memiliki struktur kelembagaan. Tidak seperti perjanjian ad hoc, organisasi internasional memiliki kapasitas berkelanjutan untuk pengambilan keputusan kolektif (Liesbet Hooghe, 2019)

Sebelumnya, terdapat dua pendekatan umum dalam memahami organisasi internasional yaitu pendekatan rezim dan pendekatan institusional. Rezim, mengacu pada efek atau dampak dari perilaku Organisasi Internasional pada aktor lain, terutama pada negara atau dapat didefinisikan sebagai "seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana harapan aktor bertemu dalam area masalah tertentu. Sedangkan pendekatan kelembagaan mengacu pada struktur formal, organisasi dan hierarki birokrasi organisasi internasional itu sendiri seperti bagaimana organisasi dibiayai, menyediakan proses bagi negara-negara yang meninggalkan organisasi, menyediakan mekanisme bagi organisasi untuk dihentikan setelah fungsinya terpenuhi dan sebagainya (Barkin, 2006)⁴. Namun, secara umum organisasi internasional begitu penting untuk mengetahui bagaimana tatanan sosial internasional diciptakan, dihubungkan, dipelihara, dan diubah melalui

organisasi formal yang kompleks (Bhandari, 2019)⁵

Menurut Clive Archer dalam galuh (2020), menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai Instrumen

Dalam hal ini, organisasi internasional digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai intensitas konflik dan juga menyelaraskan tindakan. Dimana gambaran umum dari peran Organisasi Internasional adalah ia digunakan oleh anggota dari suatu organisasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu, juga menjadi instrumen untuk kebijakan individu pemerintah dan sebagai sarana bagi sejumlah negara untuk berdiplomasi (Arviansyah, 2022)⁶. Dengan menyelaraskan tindakan sesuai dengan organisasi internasional tersebut maka suatu negara telah menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa kinerjanya sesuai dengan organisasi internasional yang berlandaskan kesamaan tujuan..

2. Sebagai arena.

Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan wadah bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam berdiskusi dan bekerjasama. Didalamnya, organisasi internasional harus bersifat netral dan tidak dapat memihak sisi manapun (Arviansyah, 2022) sehingga

diharapkan berbagai negara dapat menjadikannya sebagai tempat berkonsultasi maupun memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional.

3. Sebagai aktor independen.

Dalam hal ini, organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi. Organisasi internasional dapat melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan program yang mereka bentuk tanpa dipengaruhi dari kepentingan luar organisasi. (Galuh Artika Sari, 2020).

B. Konsep Ketahanan Pangan (*Food Security*)

Ketahanan pangan (*Food Security*) merupakan salah satu aspek yang patut diperhitungkan dalam menghadapi krisis iklim kontemporer. Pasalnya, tanpa adanya penanganan atas krisis pangan yang terjadi, maka dipastikan akan menghasilkan suatu dampak yang cukup membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan laporan EC-FAO, disebutkan bahwa pada *World Food Summit* pada tahun 1996 disebutkan “Ketahanan pangan ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat” (FAO, 2008). Namun, kondisi kontemporer memperlihatkan hal sebaliknya, dimana pada tahun 2021, diperkirakan 29,3 persen populasi global – 2,3 miliar orang – mengalami

kerawanan pangan sedang atau berat, dan 11,7 persen (923,7 juta orang) menghadapi kerawanan pangan yang parah (FAO, 2022).

Secara historis, pada awal 1970-an, konsep ketahanan pangan awalnya hanya berfokus pada bagaimana memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga makanan pokok, yang disebabkan oleh volatilitas ekstrim harga komoditas pertanian dan turbulensi di pasar mata uang dan energi pada waktu Ketahanan pangan pada saat itu didefinisikan kemudian pada itu (E.M. Berry, 2015). Konferensi Pangan Dunia pada tahun 1974 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai "ketersediaan setiap saat pasokan pangan dunia yang memadai dari bahan makanan pokok untuk mempertahankan ekspansi konsumsi pangan yang stabil dan untuk mengimbangi fluktuasi produksi dan harga". Evolusi konsep pun berlanjut pada tahun 1994 dan terus mengalami perkembangan hingga pada *World Summit on Food Security* 2009, revisi resmi terakhir dengan menambahkan dimensi keempat stabilitas pada konsep ketahanan pangan (Berry, 2019)

Dalam memahami ketahanan pangan, terdapat empat dimensi utama di dalamnya yaitu Ketersediaan Fisik Pangan (*Physical Availability of Food*); Akses Ekonomi dan Fisik terhadap Pangan (*Economic and Physical Access to Food*); Pemanfaatan Makanan (*Food Utilization*); dan Stabilitas tiga dimensi lainnya dari waktu ke waktu (*Stability of the other three dimensions over time*). Namun, perlu diketahui pula bahwa pemerintah mendukung pangan dan pertanian melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi perdagangan dan

pasar (misalnya tindakan perbatasan dan kontrol harga pasar) yang menghasilkan insentif atau disinsentif harga, subsidi fiskal kepada produsen dan konsumen, dan dukungan layanan umum (FAO, 2022).

Namun menurut FAO dalam buku *Encyclopedia of Food Security and Sustainability*, empat dimensi utama dalam *food security* adalah 1) Ketersediaan pangan yang diproduksi secara lokal maupun diimpor dari luar negeri; 2) Aksesibilitas yaitu aksesibilitas dari berbagai aspek yaitu aksesibilitas fisik, ekonomi, sosial-budaya dan infrastruktur dimana makanan dapat mencapai konsumen (infrastruktur transportasi), kecukupan finansial dalam membeli, serta memastikan bahwa makanan dapat diterima secara budaya dan bahwa jaring perlindungan sosial ada untuk membantu yang kurang beruntung; 3) Pemanfaatan. Individu harus dapat makan dalam jumlah yang cukup baik dalam jumlah maupun kualitas untuk menjalani kehidupan yang sehat dan penuh untuk mewujudkan potensinya; 4) Stabilitas, berkaitan dengan kemampuan bangsa / komunitas / (rumah tangga) orang untuk menahan guncangan pada sistem rantai makanan apakah disebabkan oleh bencana alam (iklim, gempa bumi) atau yang buatan manusia (perang, krisis ekonomi). Alhasil, dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi tersebut mewakili tiap tingkatan yaitu Ketersediaan - Nasional; Aksesibilitas – Rumah Tangga; Pemanfaatan – Individu; Stabilitas – dapat dianggap sebagai dimensi waktu yang mempengaruhi semua tingkatan. Keempat dimensi ini harus utuh untuk ketahanan pangan secara penuh (Berry, 2019).

C. Konsep Krisis Pangan

Krisis pangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena kelangkaan pangan. Dalam hal ini, konsep mengenai krisis pangan merupakan sebuah bentuk antitesa dari ketahanan pangan (*Food Security*). Kehadiran konsep ketahanan pangan berusaha mendeskripsikan bagaimana pangan sebagai komponen utama masyarakat perlu diperhatikan dan disesuaikan kebutuhannya agar dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat secara luas. Adapun konsep mengenai krisis pangan mendeskripsikan mengenai gambaran kekurangan pangan sebagai bentuk kegagalan dari implementasi ketahanan pangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam memahami hal tersebut, pangan sendiri berasal dari sumber hayati produk pertanian, kehutanan, perkebunan, perairan, perikanan, dan peternakan baik hasil olahan maupun bukan hasil olahan yang ditujukan untuk membuat makanan dan minuman bagi konsumsi masyarakat. Alhasil, negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan juga bergizi seimbang dengan memanfaatkan sumber daya alam, kelembagaan, dan budaya lokal (Disketapang, 2021). Singkatnya, keempat dimensi utama pada ketahanan pangan perlu dipenuhi untuk mencegah terjadinya krisis pangan yaitu ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan dan stabilitas sehingga diharapkan dengan terpenuhinya keempat aspek tersebut dapat menjaga kebutuhan pangan

negara dari krisis pangan (Berry, 2019).

Dalam laporan FAO “*Global Report on Food Crises 2022*” dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahap pada penyebab terjadinya krisis pangan. Dalam laporan tersebut, FAO menjabarkan kategori dimana kondisi dapat dikatakan sebagai krisis pangan. Fase tersebut dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut (Food Security Information Network, 2022).

1. Tidak ada atau krisis pangan minim
 - a) Setiap rumah tangga bisa atau memenuhi kebutuhan pangan maupun nonpangannya tanpa harus melakukan tindakan tak lazim untuk mendapatkan penghasilan dan pangan
 - b) Diperlukannya aksi menekan risiko bencana dan membangun ketahanan pangan.
2. Tertekan atau *stressed*
 - a) Setiap rumah tangga mempunyai akses untuk pangan tapi tak mampu membayar kebutuhan nonpangannya tanpa melakukan tindakan yang dapat memicu stress
 - b) Dibutuhkannya aksi untuk melindungi sumber pencaharian dan menekan risiko bencana
3. Krisis
 - a) Adanya gap dalam konsumsi rumah tangga yang dapat tercermin dari angka gizi buruk yang lebih tinggi dari biasanya

- b) Mampu memenuhi kebutuhan pangan minimumnya tapi hanya dengan cara menghabiskan aset pentingnya
 - c) Membutuhkan tindakan sesegera mungkin agar dapat melindungi mata pencaharian dan mengurangi tingkat kesenjangan konsumsi pangan
4. Darurat
- a) Adanya gap konsumsi pangan yang berjumlah besar, digambarkan dengan jumlah malnutrisi yang sangat tinggi serta angka kematian yang sangat melampaui batas
 - b) Mampu mengurangi jumlah kesenjangan konsumsi pangan tetapi dengan cara menghabiskan pendapatan yang darurat atau menjual semua aset yang ada
 - c) Diperlukannya tindakan untuk menyelamatkan nyawa serta mata pencaharian
5. Bencana atau kelaparan
- a) Sangat kekurangan makanan atau kebutuhan dasar lainnya
 - b) Terjadinya kemelaratan, kelaparan, kematian, serta tingkat malnutrisi akut yang sangat tinggi
 - c) Diperlukan tindakan untuk mencegah kematian yang meluas serta kehancuran pada mata pencaharian

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah populasi yang mengalami krisis

pangan cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, angka tersebut mereka melampaui semua rekor sebelumnya seperti yang dilaporkan oleh *Global Report on Food Crises* (GRFC), dengan hampir 193 juta orang mengalami kerawanan pangan akut dan membutuhkan bantuan mendesak di 53 negara/wilayah, menurut temuan GRFC 2022 (Food Security Information Network, 2022). Hal ini tentu akan menjadi suatu fenomena yang perlu ditangani mengingat angka tersebut cukup memprihatinkan.

Selain itu, krisis pangan saat ini berbeda dengan krisis pangan di masa lalu dalam beberapa hal. Di masa lalu, krisis pangan sebagian besar terkait dengan cuaca atau lingkungan. Namun, saat ini banyak hal yang dapat mengakibatkan krisis pangan dapat terjadi, kenaikan harga minyak, pengalihan lahan untuk produksi bahan bakar nabati, penurunan produktivitas pertanian, dan pertumbuhan pendapatan, serta berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik lainnya, semuanya berkontribusi pada perubahan produksi, ketersediaan, dan harga pangan (Col, 2008). Namun, bukti menunjukkan bahwa jika pemerintah menggunakan kembali sumber daya untuk memprioritaskan konsumen makanan, dan untuk memberi insentif pada produksi, pasokan, dan konsumsi makanan bergizi yang berkelanjutan, mereka akan membantu membuat diet sehat lebih murah dan lebih terjangkau untuk semua. (FAO, 2022)